 ISSN 3123-2426 (E)

PENGARUH PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TERHADAP PARTISIPASI POLITIK: STUDI EMPIRIS PADA PEREMPUAN DI MASYARAKAT NIAS

Marselina Halawa[1)]
[1)]Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: marselinahalawa892@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of women's empowerment programs on women's political participation in Nias communities. Women's empowerment is an effort to improve women's knowledge, skills, self-confidence, and decision-making abilities, enabling them to participate more actively in political life. This study employs a quantitative approach with an associative research design. Data are planned to be collected through questionnaires distributed to women who meet the research criteria. Women's empowerment programs serve as the independent variable (X), while women's political participation serves as the dependent variable (Y). Political participation is measured through voting, involvement in community or political organizations, participation in community meetings, expressing aspirations to the government, and involvement in decision-making within the community. The data will be analyzed using descriptive statistics and simple linear regression, with hypothesis testing conducted using the t-test and the coefficient of determination (R^2). This study is expected to provide empirical insights into the effect of women's empowerment programs on political participation and serve as a basis for evaluating and developing empowerment programs that address the needs of women in Nias communities.

Keywords: women's empowerment, political participation, women, Nias communities.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program pemberdayaan perempuan terhadap partisipasi politik perempuan di masyarakat Nias. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, dan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan serta berpartisipasi dalam kehidupan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pengumpulan data direncanakan melalui penyebaran kuesioner kepada perempuan yang menjadi responden penelitian. Program pemberdayaan perempuan ditetapkan sebagai variabel independen (X), sedangkan partisipasi politik perempuan sebagai variabel dependen (Y). Partisipasi politik diukur melalui penggunaan hak pilih, keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik, keikutsertaan dalam musyawarah, penyampaian aspirasi kepada pemerintah, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear sederhana, dengan pengujian hipotesis melalui uji t serta koefisien determinasi (R^2). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh program pemberdayaan perempuan terhadap partisipasi politik serta menjadi bahan evaluasi untuk mengembangkan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan di masyarakat Nias.

Kata Kunci: pemberdayaan perempuan, partisipasi politik, perempuan, masyarakat Nias.

PENDAHULUAN

Perempuan merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan perempuan tidak hanya berperan dalam lingkungan keluarga, tetapi juga memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik. Dalam sistem demokrasi, perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk menyampaikan pendapat, menentukan pilihan politik, mengikuti proses pengambilan keputusan, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi perempuan dalam politik menjadi salah satu indikator penting untuk melihat sejauh mana prinsip kesetaraan, keadilan, dan keterwakilan masyarakat telah diwujudkan dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik tidak dapat dipandang hanya sebagai upaya memenuhi keterwakilan kelompok tertentu, tetapi juga sebagai bagian dari usaha membangun pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan mampu memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, kesetaraan hak politik perempuan telah memperoleh landasan konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita memperkuat komitmen Indonesia terhadap penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Landasan tersebut menunjukkan bahwa perempuan mempunyai hak untuk terlibat dalam kehidupan politik tanpa mengalami pembatasan berdasarkan jenis kelamin. Meskipun demikian, pengakuan terhadap hak politik secara hukum belum tentu secara otomatis menghasilkan partisipasi politik yang setara dalam praktik kehidupan masyarakat.

Partisipasi politik merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan demokrasi. Menurut Miriam Budiardjo (2008), partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Pengertian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak terbatas pada kegiatan memberikan suara dalam pemilihan umum, tetapi juga mencakup berbagai tindakan yang memungkinkan masyarakat memengaruhi proses politik dan kebijakan publik. Dalam kaitannya dengan perempuan, partisipasi politik dapat diwujudkan melalui penggunaan hak pilih, keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik, keikutsertaan dalam musyawarah desa, penyampaian aspirasi kepada pemerintah, keterlibatan dalam kegiatan pendidikan politik, serta pencalonan dan keterlibatan dalam lembaga pengambilan keputusan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1976) menjelaskan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Pandangan ini memperlihatkan bahwa partisipasi politik memiliki hubungan erat dengan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan kepentingan dan memengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Bagi perempuan, keterlibatan tersebut sangat penting karena berbagai kebijakan publik, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan keluarga, kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan sosial, dapat berhubungan langsung dengan kebutuhan serta pengalaman perempuan. Ketika perempuan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses politik, mereka dapat menyampaikan persoalan yang dihadapi dan memperjuangkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

Namun, partisipasi politik perempuan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya hak politik secara formal. Kemampuan perempuan untuk memahami persoalan politik, memperoleh informasi, membangun kepercayaan diri, mengembangkan kepemimpinan, serta mengakses ruang pengambilan keputusan turut memengaruhi tingkat keterlibatan mereka. Perempuan yang memiliki pengetahuan politik terbatas atau kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sosialnya mungkin mengalami kesulitan untuk menyampaikan aspirasi dan mengambil peran dalam kegiatan politik. Sebaliknya, perempuan yang mempunyai akses terhadap pendidikan, informasi, jaringan sosial, dan kesempatan pengembangan kapasitas berpotensi lebih mampu terlibat secara aktif dalam kehidupan politik. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang tidak hanya mengakui hak politik perempuan, tetapi juga memperkuat kemampuan dan kesempatan mereka untuk menggunakan hak tersebut secara nyata.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik adalah melalui program pemberdayaan perempuan. Secara umum, pemberdayaan perempuan merupakan proses memperkuat kemampuan, pengetahuan, keterampilan, kemandirian, kepercayaan diri, serta posisi tawar perempuan agar mampu menentukan pilihan dan berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan atau menyelenggarakan kegiatan bagi perempuan, melainkan menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan memiliki kendali lebih besar terhadap keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan mempunyai dimensi sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik yang saling berkaitan.

Menurut Naila Kabeer (1999), pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan individu untuk membuat pilihan hidup yang strategis, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan tersebut. Kabeer menjelaskan pemberdayaan melalui tiga unsur utama, yaitu sumber daya (resources), kemampuan bertindak (agency), dan hasil yang dicapai (achievements). Sumber daya mencakup akses terhadap pendidikan, informasi, dukungan sosial, dan berbagai sarana yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan. Kemampuan bertindak berkaitan dengan

kapasitas seseorang untuk menentukan pilihan, mengambil keputusan, serta menjalankan tindakan sesuai dengan kepentingannya. Sementara itu, hasil yang dicapai menggambarkan perubahan nyata yang diperoleh melalui proses tersebut. Dalam penelitian ini, pemikiran Kabeer dapat digunakan untuk memahami bahwa program pemberdayaan perempuan berpotensi meningkatkan partisipasi politik apabila program tersebut tidak hanya menyediakan pelatihan, tetapi juga memperkuat kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan dan terlibat dalam proses politik.

Pandangan Kabeer tersebut relevan dengan kondisi perempuan yang mungkin menghadapi keterbatasan dalam memperoleh informasi politik, mengembangkan kemampuan kepemimpinan, dan mengakses ruang pengambilan keputusan. Program pemberdayaan yang memberikan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, pengembangan keterampilan komunikasi, pendampingan organisasi, dan penguatan jaringan sosial dapat membantu perempuan meningkatkan kapasitasnya. Ketika perempuan memiliki sumber daya dan kemampuan bertindak yang lebih baik, mereka diharapkan lebih berani menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam musyawarah, mengikuti kegiatan organisasi, serta menggunakan hak politiknya secara sadar. Meskipun demikian, hubungan tersebut tetap perlu dibuktikan melalui penelitian empiris karena peningkatan kapasitas perempuan belum tentu selalu diikuti oleh peningkatan partisipasi politik apabila masih terdapat hambatan sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan.

Selain Kabeer, Amartya Sen (1999) melalui pendekatan kapabilitas menekankan pentingnya kebebasan dan kesempatan nyata yang dimiliki seseorang untuk menjalani kehidupan yang dianggap bernilai. Pendekatan ini menempatkan pembangunan bukan hanya pada peningkatan pendapatan atau penyediaan sumber daya, melainkan juga pada perluasan kemampuan individu untuk menentukan pilihan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Jika diterapkan pada pemberdayaan perempuan, pemikiran Sen menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah perempuan yang mengikuti kegiatan atau pelatihan. Program tersebut juga perlu dilihat dari sejauh mana perempuan memperoleh kesempatan nyata untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang telah dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam proses politik.

Dengan demikian, program pemberdayaan perempuan perlu diarahkan pada perubahan yang lebih substantif. Perempuan tidak hanya diharapkan menjadi peserta kegiatan, tetapi juga mampu menjadi pengambil keputusan, penggerak masyarakat, penyampai aspirasi, dan pihak yang terlibat dalam menentukan arah pembangunan. Program pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kapabilitas dapat mencakup pendidikan politik, pengenalan hak-hak warga negara, pelatihan berbicara di depan umum, pengembangan kepemimpinan perempuan, pendampingan kelompok perempuan, serta peningkatan kemampuan dalam mengakses informasi dan berkomunikasi dengan pemerintah. Berbagai bentuk program tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkuat kesiapan perempuan dalam berpartisipasi secara lebih aktif, mandiri, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif pembangunan manusia, United Nations Development Programme (UNDP) juga menempatkan pemberdayaan dan partisipasi sebagai unsur penting dalam perluasan kemampuan manusia untuk menentukan arah kehidupannya. Gagasan tersebut memberikan dasar bahwa perempuan perlu memperoleh kesempatan untuk berperan sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat kebijakan. Dalam kehidupan politik, kesempatan tersebut dapat diwujudkan melalui pelibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan, forum konsultasi publik, musyawarah desa, organisasi masyarakat, serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Program pemberdayaan yang membuka ruang partisipasi secara nyata diharapkan dapat membantu perempuan mengembangkan kemampuan sekaligus memperkuat posisi mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Pemberdayaan perempuan juga memiliki hubungan dengan konsep modal sosial. Robert D. Putnam (1993) menjelaskan pentingnya jaringan sosial, norma, dan kepercayaan dalam mendukung koordinasi serta kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks perempuan, jaringan sosial yang kuat dapat membantu memperluas akses terhadap informasi politik, mempertemukan perempuan dengan tokoh masyarakat, serta membangun dukungan untuk menyampaikan aspirasi. Kelompok perempuan, organisasi kemasyarakatan, kelompok usaha, dan forum warga dapat menjadi sarana untuk bertukar pengalaman serta mengembangkan keberanian dalam menghadapi persoalan publik. Apabila program pemberdayaan mampu membangun jaringan sosial yang terbuka dan mendukung keterlibatan perempuan, program tersebut berpotensi memperluas kesempatan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik.

Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi dan sosial tidak selalu secara langsung menghasilkan peningkatan partisipasi politik. Perempuan yang telah memiliki keterampilan usaha atau memperoleh penghasilan tambahan belum tentu mempunyai waktu, kesempatan, dan dukungan yang cukup untuk mengikuti kegiatan politik. Demikian pula, perempuan yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan belum tentu berani menyampaikan aspirasi apabila lingkungan sosialnya belum memberikan ruang yang setara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pemberdayaan perempuan dan partisipasi politik perlu dipahami sebagai hubungan yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendidikan, usia, pekerjaan, kondisi ekonomi, dukungan keluarga, norma sosial, pengalaman organisasi, dan akses terhadap lembaga politik.

Persoalan tersebut menjadi relevan ketika penelitian diarahkan pada perempuan di masyarakat Nias. Masyarakat Nias memiliki kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan yang perlu dipahami berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Dalam masyarakat yang memiliki tradisi dan struktur sosial yang kuat, hubungan keluarga, kedudukan sosial, pola komunikasi,

pembagian tanggung jawab rumah tangga, serta pandangan mengenai peran perempuan dan laki-laki dapat menjadi bagian penting dalam memahami partisipasi perempuan di ruang publik. Namun, faktor-faktor tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai hambatan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Nias. Pengaruhnya perlu diteliti dengan memperhatikan perbedaan pengalaman antarperempuan, kondisi wilayah, tingkat pendidikan, pekerjaan, keterlibatan organisasi, dan kesempatan yang tersedia bagi perempuan untuk berpartisipasi.

Perempuan di masyarakat Nias dapat memiliki pengalaman dan peluang yang berbeda dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan maupun kegiatan politik. Sebagian perempuan mungkin telah terlibat dalam organisasi kemasyarakatan, kelompok usaha, kegiatan sosial, atau forum pembangunan. Sebagian lainnya mungkin lebih banyak mencurahkan waktu untuk pekerjaan, usaha keluarga, dan tanggung jawab rumah tangga sehingga kesempatan mengikuti kegiatan publik menjadi terbatas. Ada pula kemungkinan bahwa perempuan mempunyai minat untuk terlibat dalam politik, tetapi belum memperoleh informasi yang cukup mengenai hak politik, proses pemerintahan, mekanisme penyampaian aspirasi, dan kesempatan menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Keadaan tersebut merupakan kemungkinan yang perlu diperiksa melalui pengumpulan data, bukan kesimpulan yang dapat ditetapkan tanpa penelitian lapangan.

Dalam konteks ini, program pemberdayaan perempuan menjadi penting karena dapat berfungsi sebagai sarana untuk mempertemukan kebutuhan perempuan dengan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Program yang sesuai dengan kebutuhan lokal dapat memberikan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, peningkatan keterampilan komunikasi, pendampingan organisasi, serta penguatan kemampuan perempuan dalam mengakses informasi dan menyampaikan pendapat. Program juga dapat dirancang melalui kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, dan lembaga penyelenggara pemilu. Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan perempuan, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas agar mereka dapat terlibat dalam musyawarah, perencanaan pembangunan, pengawasan kebijakan, dan kegiatan politik lainnya.

Walaupun demikian, keberadaan program pemberdayaan belum cukup untuk membuktikan bahwa partisipasi politik perempuan telah meningkat. Keberhasilan program perlu dilihat dari perubahan yang terjadi setelah perempuan mengikuti kegiatan tersebut. Perubahan itu dapat berupa meningkatnya pemahaman mengenai hak politik, bertambahnya keberanian menyampaikan pendapat, meningkatnya keikutsertaan dalam organisasi, bertambahnya keterlibatan dalam musyawarah, atau meningkatnya kemampuan memengaruhi keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pengukuran semacam ini diperlukan agar pemberdayaan tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan atau jumlah peserta yang hadir, melainkan berdasarkan manfaat yang dirasakan dan perubahan partisipasi yang dapat diamati.

Pada titik inilah terdapat persoalan nyata yang perlu mendapat perhatian. Secara normatif, perempuan telah memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Berbagai bentuk pemberdayaan juga dapat diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas perempuan. Akan tetapi, antara tersedianya hak, pelaksanaan program, dan terwujudnya partisipasi politik yang aktif masih terdapat kemungkinan kesenjangan. Perempuan dapat mengikuti kegiatan pemberdayaan, tetapi belum tentu memperoleh kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Program dapat meningkatkan pengetahuan, tetapi belum tentu mengubah perilaku politik apabila tidak disertai dukungan keluarga, lingkungan sosial, dan lembaga pemerintahan. Demikian pula, keikutsertaan dalam pemilihan umum tidak selalu mencerminkan keterlibatan yang lebih luas dalam proses perencanaan, pengawasan, dan penentuan kebijakan publik.

Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan antara partisipasi politik yang bersifat prosedural dan partisipasi politik yang bersifat substantif. Partisipasi prosedural dapat terlihat dari penggunaan hak pilih atau kehadiran dalam kegiatan politik tertentu. Sementara itu, partisipasi substantif berkaitan dengan kemampuan perempuan untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan kepentingan, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang dihasilkan. Pembedaan ini penting karena peningkatan jumlah perempuan yang mengikuti kegiatan politik belum tentu menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh pengaruh yang berarti dalam proses politik. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh program pemberdayaan perempuan perlu memperhatikan bukan hanya frekuensi keikutsertaan, tetapi juga bentuk, kualitas, dan tingkat keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik.

Selanjutnya, Sidney Verba, Kay Lehman Schlozman, dan Henry E. Brady (1995) melalui karya Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics menjelaskan bahwa partisipasi politik berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki individu, keterlibatan psikologis terhadap politik, serta proses mobilisasi melalui jaringan dan organisasi. Sumber daya seperti waktu, uang, dan keterampilan dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan politik. Pemikiran ini memberikan penjelasan bahwa keterbatasan partisipasi perempuan tidak seharusnya langsung ditafsirkan sebagai rendahnya minat terhadap politik. Keterlibatan perempuan juga dapat dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, sumber daya ekonomi, keterampilan, kesempatan, dan ajakan atau dukungan dari organisasi maupun lingkungan sosial.

Jika dikaitkan dengan masyarakat Nias, pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menelaah apakah program pemberdayaan memberikan sumber daya dan dukungan yang diperlukan perempuan agar dapat berpartisipasi. Pelatihan yang meningkatkan keterampilan komunikasi, misalnya, dapat membantu perempuan menyampaikan pendapat dengan lebih jelas. Pendidikan politik dapat

 ISSN 3123-2426 (E)

memperkuat pemahaman mengenai hak dan mekanisme pemerintahan. Sementara itu, pembentukan jaringan organisasi dapat membuka kesempatan bagi perempuan untuk mengikuti forum publik dan membangun hubungan dengan pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Namun, apabila program tidak memperhatikan keterbatasan waktu, tanggung jawab keluarga, biaya partisipasi, dan akses terhadap kegiatan, manfaat program mungkin tidak dirasakan secara merata oleh semua peserta.

Di samping faktor sumber daya dan jaringan sosial, faktor psikologis juga perlu diperhatikan. Kepercayaan diri, kesadaran politik, dan keyakinan bahwa pendapatnya dapat memberikan perubahan merupakan aspek yang dapat berhubungan dengan keterlibatan perempuan. Program pemberdayaan yang memberikan pengalaman berbicara, berdiskusi, memimpin kelompok, dan menyampaikan usulan dapat membantu perempuan mengembangkan keberanian untuk terlibat dalam ruang publik. Namun, peningkatan kepercayaan diri harus disertai dengan kesempatan nyata untuk menggunakan kemampuan tersebut. Apabila perempuan telah memiliki kemampuan tetapi tidak diberi ruang untuk berbicara atau aspirasinya tidak ditanggapi, partisipasi yang diharapkan dapat terhambat. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan perlu dilihat sebagai proses yang melibatkan perubahan kapasitas individu sekaligus perbaikan lingkungan sosial dan kelembagaan.

Kesenjangan antara tujuan pemberdayaan dan hasil partisipasi politik tersebut menjadi alasan penting untuk melakukan penelitian secara empiris. Selama ini, pembahasan mengenai pemberdayaan perempuan dapat berfokus pada peningkatan keterampilan, kemandirian ekonomi, atau kesejahteraan keluarga. Aspek-aspek tersebut tetap penting, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan sejauh mana program pemberdayaan berpengaruh terhadap partisipasi politik perempuan. Demikian pula, kajian mengenai partisipasi politik perempuan dapat menekankan faktor pendidikan, kondisi ekonomi, budaya politik, atau keterwakilan perempuan, tanpa selalu menSguji secara khusus hubungan antara keterlibatan dalam program pemberdayaan dan tingkat partisipasi politik. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang secara terarah menempatkan program pemberdayaan perempuan sebagai variabel yang diduga memengaruhi partisipasi politik perempuan.

Secara teoretis, hubungan tersebut juga tidak dapat dianggap otomatis. Kerangka pemberdayaan Kabeer menekankan pentingnya sumber daya, kemampuan bertindak, dan hasil yang dicapai, sedangkan pendekatan kapabilitas Sen menekankan pentingnya kesempatan nyata untuk menggunakan kemampuan. Sementara itu, pendekatan partisipasi politik Verba, Schlozman, dan Brady menekankan sumber daya, keterlibatan psikologis, dan mobilisasi sebagai unsur yang berkaitan dengan partisipasi. Ketiga pendekatan tersebut dapat saling melengkapi untuk menjelaskan bagaimana program pemberdayaan mungkin memengaruhi keterlibatan perempuan. Namun, masing-masing pendekatan juga menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya atau kapasitas belum tentu menghasilkan partisipasi politik apabila perempuan tidak mempunyai kesempatan, dukungan, atau ruang yang memadai untuk bertindak.

Dengan demikian, penelitian ini perlu menguji apakah program pemberdayaan perempuan benar-benar mempunyai pengaruh terhadap partisipasi politik perempuan di masyarakat Nias. Pengujian tersebut penting karena hubungan antara kedua variabel dapat berbeda menurut kondisi masyarakat dan bentuk program yang dilaksanakan. Program yang berorientasi pada keterampilan ekonomi mungkin memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan program yang secara langsung menyediakan pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan. Program yang melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan juga mungkin menghasilkan perubahan yang berbeda dari program yang hanya memberikan materi atau bantuan. Perbedaan tersebut perlu dipertimbangkan agar hasil penelitian tidak hanya menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi yang mendukung efektivitas program pemberdayaan.

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan partisipasi politik dapat menjadi dasar untuk mengembangkan penelitian ini. Kabeer (1999), misalnya, membahas pemberdayaan perempuan melalui hubungan antara sumber daya, kemampuan bertindak, dan hasil yang dicapai. Kajian tersebut memberikan landasan konseptual untuk memahami proses pemberdayaan, tetapi tidak secara khusus membuktikan pengaruh program pemberdayaan terhadap partisipasi politik perempuan di masyarakat Nias.

Sementara itu, Verba, Schlozman, dan Brady (1995) memberikan penjelasan mengenai sumber daya dan mobilisasi dalam partisipasi politik. Kedua perspektif tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk menyusun kerangka penelitian, tetapi hubungan antarvariabel tetap perlu diuji dalam konteks masyarakat yang menjadi lokasi penelitian.

Perbedaan antara penjelasan teoretis dan kebutuhan pembuktian empiris tersebut menjadi dasar untuk memperjelas posisi penelitian ini. Teori pemberdayaan menjelaskan alasan mengapa peningkatan kemampuan perempuan dapat mendukung partisipasi politik, sedangkan teori partisipasi politik menjelaskan berbagai faktor yang memungkinkan seseorang terlibat dalam kegiatan politik. Akan tetapi, teori-teori tersebut tidak secara otomatis menjawab seberapa besar pengaruh program pemberdayaan terhadap partisipasi politik perempuan di masyarakat Nias. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menghubungkan kedua perspektif tersebut dengan mengumpulkan data langsung dari perempuan yang menjadi responden penelitian. Melalui pendekatan empiris, penelitian dapat menguji apakah perempuan yang memperoleh akses atau keterlibatan dalam program pemberdayaan menunjukkan tingkat partisipasi politik yang berbeda, dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan desain penelitian dan faktor-faktor lain yang relevan.

Dari sisi penelitian terdahulu, masih diperlukan penelusuran literatur yang lebih terarah untuk mengetahui

 ISSN 3123-2426 (E)

sejauh mana penelitian sebelumnya telah menguji hubungan antara program pemberdayaan perempuan dan partisipasi politik, khususnya pada masyarakat Nias. Kesenjangan penelitian tidak seharusnya hanya didasarkan pada anggapan bahwa belum ada penelitian yang membahas topik tersebut. Sebaliknya, kesenjangan perlu dibangun melalui perbandingan penelitian terdahulu, meliputi fokus penelitian, teori yang digunakan, variabel yang dianalisis, metode penelitian, karakteristik responden, dan lokasi penelitian. Apabila penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pemberdayaan ekonomi atau keterwakilan politik perempuan secara umum, penelitian ini dapat menawarkan fokus yang lebih khusus dengan menguji pengaruh program pemberdayaan terhadap partisipasi politik perempuan dalam konteks masyarakat Nias. Dengan cara tersebut, kebaruan penelitian dapat ditunjukkan secara lebih akademis dan tidak hanya didasarkan pada perbedaan lokasi penelitian.

Selain kesenjangan dalam literatur, penting pula untuk memperhatikan kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang perlu diverifikasi di lapangan. Program pemberdayaan perempuan pada dasarnya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik. Namun, efektivitas program tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan tujuan yang tercantum dalam dokumen kegiatan. Perlu diketahui apakah perempuan benar-benar memperoleh manfaat dari program tersebut, apakah pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta apakah perubahan tersebut diikuti oleh peningkatan keterlibatan politik. Apabila ditemukan bahwa perempuan telah mengikuti program pemberdayaan tetapi partisipasi politiknya belum berkembang secara optimal, kondisi tersebut dapat menjadi persoalan empiris yang penting untuk dianalisis lebih lanjut.

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan bagaimana keberhasilan program pemberdayaan selama ini dinilai. Apabila keberhasilan hanya diukur melalui jumlah peserta, jumlah pelatihan, atau besarnya bantuan yang diberikan, perubahan pada kemampuan perempuan untuk terlibat dalam proses politik mungkin belum terlihat secara memadai. Padahal, tujuan pemberdayaan yang lebih luas adalah memperkuat kemampuan perempuan dalam menentukan pilihan, menyampaikan aspirasi, dan berperan dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk melihat hubungan antara pelaksanaan program pemberdayaan dan bentuk partisipasi politik yang dapat diamati, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki arah dan pelaksanaan program pada masa mendatang.

Penelitian ini memiliki urgensi karena partisipasi politik perempuan berkaitan dengan kualitas demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Perempuan bukan hanya kelompok yang menerima dampak kebijakan pemerintah, tetapi juga warga negara yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembentukan kebijakan tersebut. Apabila perempuan mempunyai kesempatan yang terbatas untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan dan pengalaman mereka berpotensi kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, partisipasi perempuan yang lebih luas dapat memperkaya perspektif dalam pembahasan persoalan pendidikan, kesehatan, ekonomi keluarga, perlindungan sosial, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan merupakan bagian penting dari penguatan demokrasi yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Nias, urgensi penelitian juga terletak pada perlunya memperoleh pemahaman yang sesuai dengan kondisi lokal. Program pemberdayaan yang efektif di suatu wilayah belum tentu menghasilkan pengaruh yang sama ketika diterapkan pada wilayah dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu memperhatikan pengalaman perempuan di lokasi penelitian, jenis program pemberdayaan yang pernah diikuti, akses terhadap informasi politik, dukungan keluarga, kesempatan mengikuti kegiatan publik, dan pengalaman mereka dalam menyampaikan aspirasi. Pendekatan tersebut dapat membantu menghasilkan rekomendasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan perempuan setempat, bukan sekadar mengadopsi solusi umum yang belum tentu cocok dengan keadaan masyarakat Nias.

Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bentuk pemberdayaan yang lebih berpotensi mendorong partisipasi politik perempuan. Jika hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif, program pemberdayaan dapat diperkuat melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, pengembangan keterampilan komunikasi, pendampingan organisasi perempuan, dan pelibatan perempuan dalam forum pengambilan keputusan. Jika pengaruhnya ternyata lemah atau tidak signifikan, hasil tersebut juga penting karena dapat menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan belum cukup untuk meningkatkan partisipasi politik atau bahwa faktor lain perlu diperhatikan. Dalam keadaan demikian, evaluasi program dapat diarahkan pada hambatan akses, waktu, dukungan sosial, mekanisme pelibatan masyarakat, serta keterhubungan antara kegiatan pemberdayaan dan lembaga yang menyediakan ruang partisipasi politik.

Solusi yang dapat dikembangkan melalui penelitian ini tidak hanya menekankan peningkatan kemampuan individu perempuan, tetapi juga penguatan lingkungan yang mendukung keterlibatan mereka. Pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat mengembangkan forum konsultasi yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menyampaikan pendapat. Organisasi perempuan dapat memperluas kegiatan pendidikan politik dan membangun jaringan komunikasi dengan lembaga pemerintahan. Penyelenggara program pemberdayaan dapat memastikan bahwa kegiatan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan ekonomi, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai hak warga negara dan proses pengambilan keputusan. Di samping itu, pelaksanaan program perlu mempertimbangkan waktu dan kebutuhan peserta agar perempuan dengan tanggung jawab

keluarga maupun pekerjaan tetap dapat mengakses kegiatan tersebut.

Evaluasi program juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Penyelenggara dapat menilai perubahan pengetahuan politik sebelum dan sesudah kegiatan, keaktifan perempuan dalam organisasi, keterlibatan dalam musyawarah, keberanian menyampaikan aspirasi, serta kesempatan yang diperoleh untuk memengaruhi keputusan. Indikator tersebut dapat disesuaikan dengan jenis program dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan evaluasi yang terukur, program pemberdayaan tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi dapat dikembangkan berdasarkan bukti mengenai kebutuhan perempuan dan perubahan yang benar-benar terjadi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menentukan aspek program yang perlu dipertahankan, diperbaiki, atau dikembangkan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemberdayaan perempuan mempunyai potensi untuk memperkuat partisipasi politik melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, sumber daya, jaringan sosial, dan kemampuan mengambil keputusan. Meskipun demikian, pengaruh tersebut tidak dapat diasumsikan berlaku secara otomatis karena partisipasi politik juga dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kondisi ekonomi, pengalaman organisasi, dukungan keluarga, lingkungan sosial, dan kesempatan yang tersedia dalam lembaga politik. Selain itu, kondisi masyarakat Nias perlu dipahami berdasarkan data empiris agar penelitian tidak menghasilkan generalisasi yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Oleh karena itu, penelitian berjudul "Pengaruh Program Pemberdayaan Perempuan terhadap Partisipasi Politik: Studi Empiris pada Perempuan di Masyarakat Nias" penting untuk dilaksanakan. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui apakah program pemberdayaan perempuan berpengaruh terhadap partisipasi politik, seberapa kuat pengaruh tersebut apabila dapat diukur, serta bagaimana hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan. Dengan menghubungkan teori pemberdayaan, teori partisipasi politik, dan kondisi empiris perempuan di masyarakat Nias, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus menghasilkan rekomendasi praktis untuk memperluas kesempatan perempuan dalam kehidupan politik. Pada akhirnya, pemberdayaan perempuan diharapkan tidak berhenti pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga mendorong terwujudnya partisipasi politik yang lebih aktif, bermakna, dan berkelanjutan.

TINJAUAN LITERATUR

Pemberdayaan perempuan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan perempuan agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial maupun politik. Menurut Kabeer (1999), pemberdayaan perempuan berkaitan dengan tiga unsur utama, yaitu sumber daya (resources), kemampuan bertindak (agency), dan hasil yang dicapai (achievements). Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan atau pelatihan, tetapi juga dengan kemampuan perempuan dalam menentukan pilihan, mengambil keputusan, serta memperoleh perubahan nyata dalam kehidupannya. Dalam penelitian ini, program pemberdayaan perempuan dipandang sebagai upaya yang dapat memperkuat kapasitas perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Sen (1999) melalui pendekatan kapabilitas menekankan pentingnya kebebasan dan kesempatan nyata bagi individu untuk menentukan pilihan serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Artinya, keberhasilan program pemberdayaan perempuan tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuan perempuan dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilannya. Program pemberdayaan yang mencakup pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, dan pendampingan organisasi berpotensi meningkatkan kesiapan perempuan untuk menyampaikan aspirasi serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi politik merupakan bentuk keterlibatan warga negara dalam proses politik dan pemerintahan. Budiardjo (2008) menjelaskan bahwa partisipasi politik mencakup kegiatan individu atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Sementara itu, Huntington dan Nelson (1976) memandang partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Berdasarkan pandangan tersebut, partisipasi politik perempuan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui keterlibatan dalam pemilihan umum, organisasi politik dan kemasyarakatan, musyawarah, penyampaian aspirasi, serta proses pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat.

Verba, Schlozman, dan Brady (1995) menjelaskan bahwa partisipasi politik berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki individu, keterlibatan psikologis terhadap politik, serta mobilisasi melalui jaringan dan organisasi. Pandangan ini memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan pribadi, tetapi juga oleh ketersediaan waktu, keterampilan, informasi, dukungan sosial, dan kesempatan berpartisipasi. Selain itu, Putnam (1993) menekankan pentingnya jaringan sosial, norma, dan kepercayaan dalam mendukung kerja sama masyarakat. Dengan demikian, kelompok perempuan dan organisasi kemasyarakatan dapat menjadi sarana untuk memperluas akses informasi politik, membangun kepercayaan diri, dan mendorong perempuan agar lebih aktif menyampaikan kepentingannya.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, program pemberdayaan perempuan secara teoretis berpotensi meningkatkan partisipasi politik melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, jaringan sosial, dan kemampuan mengambil keputusan. Namun, pengaruh tersebut tidak dapat dianggap terjadi secara otomatis karena partisipasi politik juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dukungan keluarga, lingkungan sosial, dan kesempatan yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian mengenai perempuan di

masyarakat Nias diperlukan untuk menguji secara empiris pengaruh program pemberdayaan perempuan terhadap partisipasi politik. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengembangkan program pemberdayaan yang tidak hanya meningkatkan kapasitas perempuan, tetapi juga memperluas keterlibatan mereka dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan menguji pengaruh antara program pemberdayaan perempuan sebagai variabel independen (X) dan partisipasi politik sebagai variabel dependen (Y). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengukuran pengaruh program pemberdayaan perempuan terhadap tingkat partisipasi politik perempuan di masyarakat Nias berdasarkan data empiris yang diperoleh dari responden.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada perempuan di masyarakat Nias, dengan lokasi yang ditetapkan sesuai wilayah penelitian yang dipilih. Populasi penelitian adalah perempuan yang berdomisili di wilayah tersebut dan memenuhi kriteria sebagai responden penelitian. Sampel akan ditentukan berdasarkan jumlah populasi dan ketersediaan data di lapangan. Teknik pengambilan sampel disesuaikan dengan kondisi populasi, sehingga responden yang terpilih dapat memberikan informasi yang relevan mengenai pengalaman mengikuti program pemberdayaan perempuan dan keterlibatan dalam kegiatan politik.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi mengenai keterlibatan perempuan dalam program pemberdayaan, manfaat program yang dirasakan, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri, serta partisipasi mereka dalam kegiatan politik. Partisipasi politik diukur melalui beberapa indikator, seperti penggunaan hak pilih, keikutsertaan dalam organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik, keterlibatan dalam musyawarah, penyampaian aspirasi kepada pemerintah, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat. Selain itu, data pendukung dapat diperoleh melalui dokumentasi yang relevan dengan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di wilayah penelitian.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden, pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, dan tingkat partisipasi politik. Selanjutnya, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh program pemberdayaan perempuan terhadap partisipasi politik. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, instrumen penelitian perlu diuji validitas dan reliabilitasnya, serta data diperiksa berdasarkan persyaratan analisis regresi yang sesuai.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui apakah program pemberdayaan perempuan memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap partisipasi politik. Koefisien determinasi (R^2) juga digunakan untuk mengetahui besarnya variasi partisipasi politik yang dapat dijelaskan oleh variabel program pemberdayaan perempuan dalam model penelitian. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menjawab tujuan penelitian dan memberikan gambaran mengenai keterkaitan program pemberdayaan perempuan dengan partisipasi politik di masyarakat Nias. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan dan memperluas keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program pemberdayaan perempuan terhadap partisipasi politik perempuan di masyarakat Nias. Program pemberdayaan perempuan ditempatkan sebagai variabel independen (X), sedangkan partisipasi politik perempuan sebagai variabel dependen (Y). Data penelitian direncanakan diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada perempuan yang menjadi responden sesuai dengan kriteria dan lokasi penelitian yang telah ditentukan.

Hasil penelitian akan menggambarkan karakteristik responden, pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, serta tingkat partisipasi politik perempuan. Karakteristik responden dapat meliputi usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, pengalaman berorganisasi, dan pengalaman mengikuti program pemberdayaan perempuan. Informasi tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang responden yang dapat berkaitan dengan pengalaman dan keterlibatan mereka dalam kehidupan politik.

Hasil pengukuran variabel program pemberdayaan perempuan akan dianalisis berdasarkan keterlibatan responden dalam program, manfaat yang dirasakan, peningkatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, serta kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan. Sementara itu, variabel partisipasi politik akan dianalisis melalui penggunaan hak pilih, keikutsertaan dalam organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik, keterlibatan dalam musyawarah, penyampaian aspirasi kepada pemerintah, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran masing-masing variabel. Sebelum pengujian hipotesis, instrumen penelitian perlu diperiksa validitas dan reliabilitasnya, sedangkan persyaratan analisis regresi linear sederhana perlu diperiksa sesuai dengan karakteristik data. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui apakah program pemberdayaan perempuan memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap partisipasi politik perempuan. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui proporsi variasi partisipasi politik yang dapat dijelaskan oleh program pemberdayaan perempuan dalam model penelitian.

Hasil pengujian tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan apakah hipotesis penelitian didukung oleh

 ISSN 3123-2426 (E)

data. Dengan demikian, kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pengaruh program pemberdayaan perempuan terhadap partisipasi politik perempuan di masyarakat Nias harus ditetapkan berdasarkan hasil analisis data yang sebenarnya.

4.2. Pembahasan

Secara teoretis, program pemberdayaan perempuan berpotensi meningkatkan partisipasi politik melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, jaringan sosial, dan kemampuan mengambil keputusan. Namun, besarnya pengaruh program tersebut terhadap partisipasi politik perempuan di masyarakat Nias perlu dibuktikan melalui data empiris. Oleh karena itu, pembahasan hasil penelitian akan diarahkan pada hubungan antara pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan bentuk keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik.

Apabila hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan, temuan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan pemberdayaan perempuan berkaitan dengan meningkatnya partisipasi politik responden. Temuan ini sejalan dengan pemikiran Kabeer (1999), yang menjelaskan pemberdayaan melalui unsur sumber daya (resources), kemampuan bertindak (agency), dan hasil yang dicapai (achievements). Program pemberdayaan yang memberikan akses terhadap informasi, pelatihan, pengalaman organisasi, dan kesempatan untuk mengambil keputusan dapat membantu perempuan mengembangkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Meskipun demikian, kesesuaian dengan teori tersebut perlu dijelaskan berdasarkan indikator yang benar-benar menunjukkan perubahan dalam data penelitian.

Hasil yang positif juga dapat dibahas melalui pendekatan kapabilitas Sen (1999). Menurut pendekatan ini, pemberdayaan tidak cukup dipahami sebagai tersedianya bantuan atau kegiatan pelatihan, tetapi juga sebagai perluasan kesempatan nyata bagi individu untuk menentukan pilihan dan melakukan tindakan yang dianggap penting. Dalam konteks penelitian ini, program pemberdayaan dapat dinilai lebih bermakna apabila perempuan tidak hanya mengikuti kegiatan, tetapi juga mempunyai kesempatan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilannya dalam musyawarah, organisasi, penyampaian aspirasi, dan proses pengambilan keputusan.

Selain itu, Verba, Schlozman, dan Brady (1995) menjelaskan bahwa partisipasi politik berkaitan dengan sumber daya, keterlibatan psikologis, dan mobilisasi melalui jaringan atau organisasi. Perspektif ini dapat membantu menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya ditentukan oleh minat pribadi, tetapi juga oleh ketersediaan waktu, keterampilan, informasi, dukungan sosial, dan kesempatan untuk berpartisipasi. Oleh sebab itu, pembahasan perlu memperhatikan apakah program pemberdayaan yang diteliti memberikan sumber daya dan dukungan yang dapat digunakan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan politik.

Sebaliknya, apabila hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, temuan tersebut tidak serta-merta berarti bahwa program pemberdayaan perempuan tidak bermanfaat. Hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa hubungan antara program pemberdayaan dan partisipasi politik belum dapat dibuktikan secara statistik pada sampel dan model yang digunakan. Penafsiran lebih lanjut perlu mempertimbangkan bentuk program yang diikuti responden, kesesuaian materi dengan kebutuhan politik, kesempatan menerapkan keterampilan, serta faktor lain seperti pendidikan, pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dukungan sosial, dan akses terhadap ruang pengambilan keputusan. Faktor-faktor tersebut merupakan kemungkinan penjelas yang perlu diperiksa, bukan penyebab yang dapat langsung dinyatakan tanpa bukti.

Dengan demikian, pembahasan penelitian ini perlu menempatkan program pemberdayaan perempuan sebagai salah satu faktor yang mungkin berkaitan dengan partisipasi politik, bukan sebagai satu-satunya faktor penentu. Penguatan kemampuan individu perlu disertai kesempatan nyata bagi perempuan untuk terlibat dalam kehidupan publik. Program pemberdayaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dapat diarahkan pada pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, pendampingan organisasi, dan perluasan akses perempuan terhadap forum musyawarah serta pengambilan keputusan.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak yang menyelenggarakan program pemberdayaan perempuan di masyarakat Nias. Evaluasi tersebut dapat digunakan untuk melihat apakah program yang dilaksanakan telah memberikan manfaat yang berkaitan dengan partisipasi politik serta aspek mana yang masih perlu diperbaiki. Rekomendasi akhir harus disesuaikan dengan temuan empiris agar tidak hanya bersifat umum, tetapi benar-benar menjawab kondisi yang ditemukan dalam penelitian.

KESIMPULAN

Program pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya yang berpotensi meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, jaringan sosial, dan kemampuan mengambil keputusan. Dalam konteks masyarakat Nias, pemberdayaan perempuan diharapkan dapat mendorong keterlibatan perempuan dalam penggunaan hak pilih, organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik, musyawarah, penyampaian aspirasi kepada pemerintah, serta pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk menguji pengaruh program pemberdayaan perempuan terhadap partisipasi politik perempuan. Data direncanakan dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta regresi linear sederhana. Namun, karena data penelitian dan hasil pengujian statistik belum tersedia, belum dapat disimpulkan apakah program pemberdayaan perempuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik perempuan di masyarakat Nias.

Oleh karena itu, hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai hubungan

antara program pemberdayaan perempuan dan partisipasi politik. Temuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, organisasi perempuan, dan pihak terkait dalam mengembangkan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan, memperluas kesempatan berpartisipasi, serta mendorong keterlibatan perempuan yang lebih aktif dan bermakna dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Informasi bibliografi tersedia pada katalog perpustakaan Mahkamah Konstitusi.

Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. Development and Change, 30(3), 435–464

Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1984). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Sen, A. (1999). Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf

Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Cambridge, MA: Harvard University Press.